

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat adalah sumber lahirnya demokrasi, bagi negara yang menganut paham demokrasi pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan.<sup>1</sup>

Pada pemilihan umum, partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dimana pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin.

Menurut Mc Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.<sup>2</sup> Melalui pemilihan umum, rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang dikehendaki baik di lembaga eksekutif sebagai kepala pemerintahan (Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota), ataupun lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD, dan DPRD).

---

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, (2011), *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 20

<sup>2</sup> Leo A gustino, (2015), *Pilkada Langsung*, *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 43, No. 02, Padang: Universitas Andalas, h. 186.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: *“pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”*<sup>3</sup>

Menurut Yudistira, pada perspektif demokrasi pemilu memiliki setidaknya 5 manfaat yaitu: <sup>4</sup>

1. Perwujudan dari kedaulatan rakyat
2. Sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.
3. Sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional
4. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
5. Sarana untuk membentuk perwakilan politik.

Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum juga dapat menunjukkan bahwa rakyat memahami masalah-masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi rakyat pada pemilihan umum dianggap sebagai ancaman dalam demokrasi. Partisipasi yang rendah dapat diasumsikan sebagai masyarakat yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan dapat diasumsikan rendahnya partisipasi sebagai ketidakpercayaan rakyat terhadap hasil Pemilu yang akan membawa perubahan.

---

<sup>3</sup> Ibid., h. 188

<sup>4</sup> Ibid., h.189

Fenomena golongan putih (Golput) dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi. Dikatakan ancaman karena Golput dinilai tidak mendukung adanya pesta demokrasi. Besarnya angka masyarakat yang tidak memilih atau Golput ini, jika melebihi angka pemenang Pemilu maka sulit membangun logika bahwasanya kandidat pemenang Pemilu merupakan representatif pilihan masyarakat. Hal ini juga tidak serta merta menjamin pemerintahan yang terbentuk mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden ataupun Kepala Daerah selalu muncul orang-orang atau pemilih yang masuk dalam golongan putih (Golput). Pada dasarnya, keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih dalam Pemilu.<sup>5</sup> Sebenarnya perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil dari masyarakat karena hal itu hanya menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Golput atau Golongan Putih adalah sebutan yang disematkan kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu atau sering pula didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu.<sup>6</sup> Perilaku Golput merupakan suatu sikap, kepercayaan yang terbentuk dari diri sendiri maupun pengaruh orang lain

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, (1999), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, h. 145

<sup>6</sup> David Apter, (1976), *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, h. 262

untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.<sup>7</sup> Salah satu contoh pelaksanaan Pilkada dengan tingkat Golput yang tinggi yaitu pada Pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017**

Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Memilih		Tidak Memilih	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
468.390	276.126	58,95%	192.264	41,05%

*Sumber:* Diolah Dari Data KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa jumlah masyarakat yang masuk ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 adalah sebanyak 468.390 orang, dengan jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 276.126 orang, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 192.264 orang.

Hasil Pilkada ini sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan. Mengapa jumlah suara masyarakat yang tidak memilih pada Pilkada tersebut sangat tinggi. Jumlah masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan Bupati Musi Banyuasin tahun 2017 ini hampir setengah dari jumlah pemilih tetap yang terdapat dalam pemilihan tersebut.

Berdasarkan data dari KPUD Musi Banyuasin bahwa, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, ada 3 kecamatan yang angka Golputnya terbilang tinggi, yaitu di Kecamatan Bayung Lencir yang mencapai jumlah Golput sebesar 27.507 orang, Kecamatan Lais dengan jumlah Golput 22.386 orang, dan Kecamatan Sekayu dengan jumlah Golput

---

<sup>7</sup> Sudijono Sastroadmojo, (1995), *Perilaku Politik*, Semarang: Semarang Press, h. 65

25.264 orang. Daerah-daerah tersebut adalah daerah di Kabupaten Muba yang paling tinggi tingkat Golputnya.<sup>8</sup>

Jumlah masyarakat yang termasuk dalam golongan putih karena tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan Bupati Muba tahun 2017 menjadi menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul faktor-faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pilkada di Musi Banyuasin tahun 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017?
2. Bagaimana tanggapan KPUD Musi Banyuasin terhadap tingginya angka golput di tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017.
2. Untuk mengetahui tanggapan KPUD Musi Banyuasin terhadap tingginya angka Golput di tahun 2017.

---

<sup>8</sup> KPUD Kabupaten Musi Banyuasin, (2016), *Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada Muba 2017*

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi bagi kajian ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan tema Golput, memperluas ilmu dan memperluas pemikiran peneliti mengenai faktor penyebab tingginya angka Golput.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi para politisi dan partai politik untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya Golput dan juga sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang faktor-faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat menjadi rujukan antara lain:

Rizki Pranata dalam *Faktor-Faktor Penyebab Golput dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015* (Skripsi, Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab Golput berpengaruh terhadap Golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

---

<sup>9</sup> Rizki Pranata, (2016), *Faktor-Faktor Penyebab Golput dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Adapun faktor penyebab perilaku Golput yang terjadi di masyarakat Kampung Baru dikarenakan sifat teknis atau berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara karena urusan pekerjaan, pendidikan dan lain-lain (diluar faktor Ideologis). Golput masyarakat yang tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia dan pesimatis bahwa pemilu/pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan serta perbaikan.

Dediwansah Solihin dalam skripsinya yang berjudul *Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa Tentang Golput*.<sup>10</sup>

Menurut hasil penelitian, dikatakan bahwa masyarakat kurang menaruh simpati terhadap Pilpres ini, karena masyarakat berpikir Presiden ini terlalu jauh dari mereka, berbeda dengan Pileg dan Pilkada. Kemudian tidak adanya implementasi langsung kepada masyarakat dari KPU, berbeda dengan Pileg atau Pilkada yang langsung berimplementasi kepada masyarakat.

Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Golput di Kecamatan Gunung Meriah itu masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui fatwa tersebut. Perbedaan antara penelitian Dediwansah dengan penelitian ini adalah penelitian Dediwansah membahas tentang Faktor penyebab masyarakat Kabupaten Aceh Golput pada Pilpres tahun 2014. Sedangkan penelitian ini membahas faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pilkada Muba tahun 2017.

---

<sup>10</sup> Dediwansah Solihin, (2016), *Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa Tentang Golput*, Medan: UIN Sumatera Utara.

Rafli Arham dalam skripsinya yang berjudul *Sikap Golput Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2013*<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa sikap Golput yang diperlihatkan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Ridan Permai dilatar belakangi oleh beberapa bentuk sikap, yaitu sikap *alienasi*, *anomie*, *sinisme* dan *apatitis*. Namun untuk keseluruhan responden, sikap Golput yang paling memdominasi adalah sikap *apatitis*. Terdapat sebanyak 121 responden memiliki bentuk sikap *apatitis*.

Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dan pendorong munculnya sikap Golput tersebut pada masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Gubri, yaitu atas faktor tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.

Penelitian ini selanjutnya berbeda dari penelitian yang akan peneliti angkat. Meskipun sama-sama membahas Golput pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lokasi dari kedua penelitian ini juga berbeda. Karena penelitian dari Rafli Arham ini berlokasi di Kabupaten Kampar sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Serta tahun penelitian dari kedua penelitian ini juga berbeda.

---

<sup>11</sup> Rafli Arham, (2015), *Sikap Golput Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2013*,

Drs. M. Pujo Darmo, MH dalam skripsinya yang berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013*<sup>12</sup>.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa KPU yang ada di Jawa Tengah menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pemilih bersikap Golput yaitu masyarakat jenuh karena terus menerus terlibat dalam pemilihan pejabat politik, menurunnya kepercayaan terhadap partai politik, belum maksimalnya pendidikan politik rakyat, persoalan teknis partai politik mengalami krisis kader sehingga calon yang diusung tidak sesuai dengan selera rakyat. Konsekuensinya rakyat semakin apatis terhadap calon yang ditawarkan partai.

Muhammad Rabbani dalam skripsinya tentang *Fenomena Golongan Putih di Kota Makassar Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013*.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan golongan putih di Kota Makassar khususnya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan tahun 2013 sangat memprihatinkan. Pada lokasi penelitian ini ditemukan dua kategori Golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suara mereka. Pertama, karena mereka apatis terhadap sistem Pemilu

---

<sup>12</sup> Pujo Darmo, (2015), *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013*, Klaten: Universitas Widyadharma.

<sup>13</sup> Muhammad Rabbani, (2013), *Fenomena Golongan Putih di Kota Makassar Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013*, Makassar: Universitas Hasanuddin

yang berjalan. Kedua, karena masyarakat tidak memiliki pilihan dari para kandidat yang tersedia.

Acu Nurhidayat dalam skripsinya tentang *Fenomena Golput di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Pada Pemilu 2004)*.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sejarah Pemilu di Indonesia, Golput dimotori oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai gerakan moral dalam rangka memboikot Pemilu yang dianggap tidak jujur dan adil, tidak demokratis, dan banyak dimanipulasi oleh pemerintah. Adapun peningkatan Golput pada pemilu 2004 disebabkan karena sebagai sikap kekecewaan terhadap pemerintah, dan elit-elit yang berkuasa, karena kendala teknis baik administratif maupun non administratif, serta karena dampak dari adanya liberalisasi politik pasca Orde Baru.

Berdasarkan keenam penelitian yang telah disebutkan diatas, semuanya memang merupakan penelitian yang membahas tentang Golput. Tetapi, keenam penelitian itu tidak sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena penelitian ini lebih berfokus untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka Golput pada Pilkada di Musi Banyuasin tahun 2017. Dimana angka Golput pada Pilkada di tahun itu mencapai 192.264 orang atau 41,05% dari jumlah keseluruhan DPT. Sehingga hal itu menjadi kelebihan tersendiri bagi penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Acu Nurhidayat, (2009), *Fenomena Golput di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Pada Pemilu 2004)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Golongan Putih (Golput)**

Pada Pemilu tahun 1977, timbul suatu gerakan diantara beberapa kelompok generasi muda terutama mahasiswa. Untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Sikap ini mereka tunjukkan dengan tidak mengunjungi masing-masing TPS. Mereka menamakan diri mereka dengan sebutan Golongan Putih atau Golput.<sup>15</sup>

Istilah ini muncul pertama kali menjelang Pemilu pertama di zaman Orde Baru tahun 1971. Pencetus istilah ini antara lain Arief Budiman, Julius Usman, dan Alm. Imam Malujo Sumali. Salah satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena Golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud serta tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam Pemilu.

Indra J. Piliang menyatakan bahwa golongan putih (Golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon Presiden serta Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian Golput. Golput kemudian dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Miriam Budiarto, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 479

<sup>16</sup> Efriza, (2012), *Political Explore*, Bandung: ALFABETA, hlm. 545

- a. Golput Ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apapun produk sistem ketatanegaran hari ini. Bagi Golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU Pemilu hanyalah bagian dari rekayasa dari segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus.
- b. Golput Pragmatis, yakni Golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada Pemilu. Ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih.
- c. Golput Politis, yakni Golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada Pemilu. Tetapi memilih Golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

Irwan H. Dulay mengemukakan bahwa golongan putih adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam event pemilihan dengan berbagai macam alasan. Baik pada pemilihan legislatif, Pilpres, dan Pilkada. Menurut B.M. Wibowo, Golput adalah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu untuk menentukan pemimpinnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., h. 534

## **2. Five Theory Voting Action (5 Teori Tindakan Memilih)**

### **a. The Field Theory of Voting Action (Teori Lapangan Tindakan Memilih)**

Teori ini mengikuti sketsa pemikiran atau ide-ide dari Kurt Lewin. Menurut Lewin, teori ini didasarkan pada pandangan bahwa: bagian atau elemen kejiwaan tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terorganisir menjadi suatu keseluruhan. Ciri teori ini adalah metode genetik. Menurut teori lapangan, yang menjadikan timbulnya suatu tingkah laku adalah force (daya, kekuatan). Kondisi dalam tingkah laku harus dideskripsikan dari sudut pandangan si pelaku tersebut.<sup>18</sup>

### **b. The Cognitive Theory of Voting Action (Teori Kognitif atau Teori Pembelajaran Sosial Tindakan Memilih)**

Dalam teori kognitif ini menjelaskan variasi dalam pemikiran dan tindakan individu dalam situasi yang serupa dari waktu ke waktu. Perbedaan perilaku dalam konteks atau rangsangan dapat melibatkan skema atau penilaian yang berbeda. Salah satu tugas pertama yang ditetapkan analisis kognitif adalah mengidentifikasi berbagai skema politik dan menilai kepentingan relatif mereka untuk tindakan memilih.<sup>19</sup>

Didalam teori kognitif ini, Albert Bandura mengembangkan model deterministik resipkoral yang terdiri dari tiga faktor utama yaitu perilaku, person dan lingkungan. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku

---

<sup>18</sup> M Visser, (1998), Five Theories Of Voting Action Strategy and Structure Of Psychological Explanation, Enschede: Universiteit Twente, h. 35.

<sup>19</sup> Ibid., h. 51

mempengaruhi lingkungan, faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku<sup>20</sup>.

Faktor person Bandura tak punya kecenderungan kognitif terutama pembawaan personalitas dan temperamen. Faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran dan kecerdasan.<sup>21</sup>

### **c. The Psycodynamic Theory of Voting Action (Teori Psikodinamik Tindakan Memilih)**

Pada dasarnya teori psikodinamika ini dikombinasi dari teori motivasi bawah sadar Freud dengan analisis kekuatan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari.<sup>23</sup>

Teori psikodinamika dari Freud adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-

---

<sup>20</sup> Sutarto, (2017), Teori Kognitif dan Implikasinya Dalam Pembelajaran, *Islamic Counseling*, Vol.01, No.02, Bengkulu: STAIN Curup, h. 56

<sup>21</sup> Ibid.,

<sup>22</sup> M Visser, (1998), Five Theories Of Voting Action Strategy and Structure Of Psychological Explanation, Enschede: Universiteit Twente, h. 59

<sup>23</sup> Ibid., h. 59

konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini.<sup>24</sup>

**d. Theory Humanistic Theory of Voting Action (Teori Humanistik Tindakan Memilih)**

Konsep teori belajar Humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, dimana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar Humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu.<sup>25</sup>

Teori Humanistik mengarah ke teori kognitif dan afektif yang memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Menurut Maslow teori Humanistik didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal:<sup>26</sup>

- 1). Suatu usaha yang positif untuk berkembang.
- 2). Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Karena sesungguhnya dalam teori humanistik ini sangat diperlukannya motivasi. Kelima tingkatan tersebut

---

<sup>24</sup> Ibid., h. 60

<sup>25</sup> A. Qodir, (2017), Pembelajaran dengan Pendekatan Humanistik, *Jurnal Pedagogik*, Vol. 04, No.02, Aceh: Universitas Muhammadiyah, h. 89

<sup>26</sup> Ibid., h. 90

antara lain : Aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dan kebutuhan fisiologi.<sup>27</sup>

#### **e. Converging Theories of Voting Action (Teori Konvergen Tindakan Memilih)**

Teori Konvergensi ini berasal dari kata *convergence* yang berarti pertemuan dari dua titik ke satu titik. Teori ini menyatakan bahwa pembentukan atau perkembangan kepribadian seseorang ditentukan oleh faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan di sekitarnya.<sup>28</sup>

Dalam kamus psikologi yang dimaksud aliran konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas (bawaan) dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah laku. Jadi Menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina perkembangan tingkah laku baik tanpa didasari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan oleh kerja yang integral (potensi bawaan) maupun faktor eksternal (lingkungan).

Berdasarkan penjelasan dari kelima (5) teori diatas, peneliti akan menggunakan teori Kognitif atau teori pembelajaran Sosial tindakan memilih dari Albert Bandura. Teori ini digunakan untuk menganalisis fenomena golput yang terjadi pada calon pemilih di Kabupaten Musi Banyuasin.

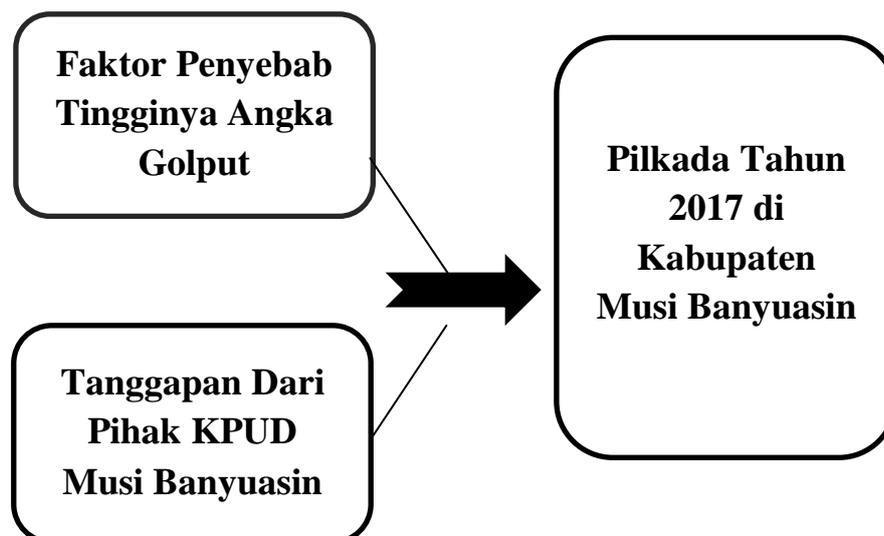
---

<sup>27</sup> M Visser, (1998), *Five Theories Of Voting Action Strategy and Structure Of Psychological Explanation*, Enschede: Universiteit Twente, h. 75

<sup>28</sup> Sumadi Surya Brata, (1998), *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo

Alasan peneliti memilih teori kognitif untuk dijadikan kerangka pemikiran dikarenakan, teori Kognitif itu sendiri membahas tentang 3 faktor utama, yaitu faktor Perilaku, faktor Person dan faktor Lingkungan. Faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi, dimana faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan faktor person mempengaruhi perilaku. Ketiga faktor ini kemudian akan digunakan untuk menganalisa hasil penelitian yang ada di bab selanjutnya.

Dari ketiga faktor (faktor perilaku, faktor person, dan faktor lingkungan) inilah yang membuat peneliti akhirnya memilih teori Kognitif sebagai kerangka teori. Dimana nantinya teori ini berguna untuk menjawab perumusan masalah yang pertama, berikut gambaran skema alur penelitian:



**Bagan 1 Skema Kognitif**

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Teori Kognitif Albert Bandura

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan oleh peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemaaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu peroses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks mengenai apa saja faktor penyebab tingginya angka golput pada pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 serta menganalisis hasil dari pandangan informan mengenai alasan mereka tidak ikut serta (Golput) pada pilkada Musi Banyuadin tahun 2017.<sup>29</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, ialah menggambarkan keadaan seperti yang telah terjadi saat ini, sehingga penulis hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi apa adanya menggunakan susunan kata-kata. Laporan peneliti mengenai apa yang benar-benar terjadi ini akan disusun sebagaimana kejadian yang sebenarnya (sesuai fakta).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) h.11

<sup>30</sup> C.R Kothari, (1990), *Research Methodologi, Methods and Techniques (Second Revises Edition)*, India: New Age International, h. 2.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dari sebuah peristiwa.<sup>31</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan 12 informan yang berasal dari 3 Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tiga Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, dan Kecamatan Sekayu. Peneliti memilih tiga kecamatan ini karena jumlah masyarakat yang tidak mengikuti pemilihan Bupati Mubatan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Data primer dalam penelitian ini berupa tanggapan dari informan mengenai apa saja yang menjadi alasan mereka tidak ikut serta pada pilkada Musi Banyuasin tahun 2017, serta tanggapan dari pihak penyelenggara pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 mengenai tingginya angka golput.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berisi daftar pemilih tetap, jumlah masyarakat yang berpartisipasi serta jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. selain itu, peneliti juga menyertakan gambar-gambar dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Musi Banyuasin dan beberapa gambar yang berkenaan dengan proses penelitian lapangan.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke 8, Bandung: Alfabeta, h. 137.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>32</sup>

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci dari masyarakat yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini orang-orang yang menjadi informan adalah masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak ikut serta atau tidak memberikan suaranya pada pelaksanaan Pilkada di Musi Banyuasin tahun 2017 (sebanyak 12 orang masyarakat dari 3 kecamatan), serta peneliti juga telah mewawancarai 3 orang anggota KPUD Musi Banyuasin untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kedua.

Data yang dikumpulkan dari proses wawancara ini berupa alasan dari masyarakat mengenai apa yang menjadi penyebab mereka tidak ikut serta pada pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 serta tanggapan dari pihak KPUD Musi Banyuasin mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada Musi Banyuasin tahun 2017.

---

<sup>32</sup> H.M. Burhanbungin, (2007), *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dalam Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, h. 11

## **b. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah berupa dokumen, gambar, serta data-data berupa laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti teliti. Dalam hal ini berupa data pemilih tetap, data jumlah partisipasi masyarakat, serta data golput. Selain itu, peneliti juga memperoleh gambar yang berkaitan dengan kegistsn sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPUD Musi Banyuasin, serta beberapa gambar yang berhubungan dengan proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

## **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dari penelitian ini adalah di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang berfokus pada peristiwa Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017. Dengan demikian yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kejadian Pilkada di Musi Banyuasin tahun 2017 serta masyarakat dan anggota KPUD yang ikut terlibat di dalamnya.

## **5. Teknik Analisis Data**

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>33</sup> Empat tahap tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, serta dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>33</sup> Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, (1992), Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press. h. 15.

- b. Reduksi Data. Merupakan tahap proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data yang muncul di catatan. Langkah ini berfungsi untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Penyajian Data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas sehingga tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab yaitu:

Bab pertama, terlebih dahulu diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang

didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan sumber yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum dari lokasi penelitian secara rinci mengenai objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Bab ketiga, pada bab ini dibahas mengenai proses analisis dan pemaknaan data yang telah didapat. Data-data yang telah didapat dianalisis menggunakan alat analisis berupa teori.

Bab keempat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi dari penelitian.